



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

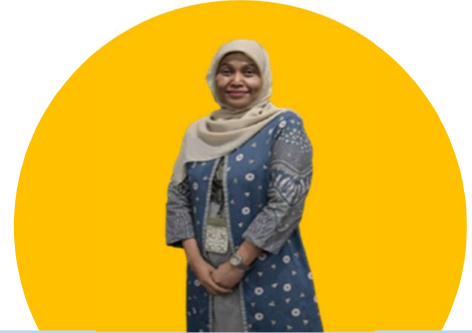
Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN
Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo,
dan Maluku Utara
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
Kata pengantar	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
C. Peran Strategis Kanwil DJKN Suluttenggomalut	11
D. Sistematika Laporan	12
BAB II RENCANA KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
C. Pengukuran Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT	23
B. ANALISIS KEBERHASILAN DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA	50
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	51
D. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI/ MITIGASI RISIKO	52
E. RENCANA AKSI KE DEPAN	54
F. REALISASI ANGGARAN	55
G. PRESTASI KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT	56
BAB IV PENUTUP	59
A. SIMPULAN	59
B. LANGKAH KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT KE DEPAN	59
Lampiran I – Ceklist Kelengkapan Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025	62
Lampiran II – Formulir Pengukuran Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025	63
Lampiran III – Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025	64
Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025	71
Adendum Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2024	75
Penghargaan	77

KATA PENGANTAR



Indriasari Sundoro
Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai unit organisasi vertikal Kementerian Keuangan yang selalu memegang teguh nilai akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Guna mencapai target yang telah ditetapkan, kami mengerahkan seluruh sumber daya yang kami miliki untuk berupaya terus menumbuhkan semangat dalam memberikan hasil yang terbaik menjalankan segala tanggung jawab sebagai suatu organisasi pemerintah yang berperan penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Sejumlah perubahan serta inovasi terus dilakukan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut demi memperbaiki kinerja yang ada.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan perolehan penghargaan monitoring evaluasi keberlanjutan pembangunan ZI WBK pada tahun 2024, serta pada tahun 2025 dilanjutkan dengan tahap pembangunan ZI-WBBM yang sampai dengan sekarang sedang menunggu pengumuman hasil penilaian dari Tim penilai nasional Kementerian PAN-RB. Hal ini menambah semangat kami untuk terus berupaya maksimal dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diembankan kepada kami sesuai dengan komitmen kami mewujudkan pelayanan yang **Bersih, Energik, Tepercaya, dan Akuntabel (BENTENAN)**.

Di tahun 2025, Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah melaksanakan berbagai program kerja dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Suluttenggomalut di tahun 2025 sangat memuaskan, yaitu mencapai **116,40**. Hal ini merupakan keberhasilan bersama seluruh pegawai Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang telah bekerja sama, bersinergi, dan berinovasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.

Dalam Laporan Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 ini akan dijelaskan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2025 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2025, serta berbagai prestasi dan inovasi yang telah dilakukan Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Penetapan ukuran kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, kami jadikan sebagai acuan dalam memfokuskan kemampuan terbaik untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, dalam Laporan Kinerja Tahunan ini, akan diuraikan hal-hal yang mendukung pencapaian target, kendala dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dimaksud.

Kondisi perekonomian yang sangat dinamis dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang, harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Dengan membawa semangat nilai-nilai organisasi yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan bersama serta memberikan kontribusi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut memberikan apresiasi atas kerja sama dan sinergi seluruh pihak khususnya para pengguna layanan yang terhubung dengan layanan kami. Kami juga berharap agar kerja sama dan sinergi yang telah baik selama ini dapat terus dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna mengarungi tahun 2026.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Manado, 18 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah DJKN
Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan
Maluku Utara



Ditandatangani secara elektronik
Indriasari Sundoro

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 ini juga sebagai bentuk penerapan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil DJKN Suluttenggomalut atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Suluttenggomalut menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam menyusun laporan kinerja, Kanwil DJKN Suluttenggomalut menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut selama tahun 2025.

Dalam menunjang tercapainya tujuan strategis tersebut, maka telah disusun Peta Strategi DJKN Tahun 2025 berdasarkan metodologi *Balanced Score Card* (BSC), yang merupakan alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dalam kerangka operasional. Metode ini telah digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan ke dalam suatu peta strategi.

Perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip *SMART-C*, yaitu:




SMART C



Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,40. Pencapaian IKU Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 secara keseluruhan adalah hijau. Capaian IKU Kanwil DJKN Suluttenggomalut tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

No.	Uraian IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase/ Indeks	Keterangan
1	Indeks Integritas	100%	105,32%	105,32%	Hijau
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,48%	120%	Hijau
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	116,78%	116,78%	Hijau
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	102,15%	102,15%	Hijau
5	Persentase Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara	100%	216,30%	120%	Hijau
6	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	99,01	120%	Hijau
7	Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi	74	108,34	120%	Hijau
8	Tingkat Kompetensi penilai pemerintah	70	87,78	120%	Hijau
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100%	139,52%	120%	Hijau
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	118,75%	118,75%	Hijau
11	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	123,36%	120%	Hijau
12	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	109,08%	120%	Hijau
13	Persentase produktifitas lelang	80%	118,67%	120%	Hijau
14	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	120%	Hijau
15	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	120%	Hijau
16	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	100%	120%	Hijau
17	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	5,59	120%	Hijau
18	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100	120,78	120%	Hijau
19	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko	80	96,22%	120%	Hijau
20	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	114,72%	120%	Hijau

Tabel 0.1. Capaian IKU Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025

The background features a dynamic composition of overlapping geometric shapes in shades of blue, orange, and yellow. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. A prominent blue shape is at the top, with orange and yellow shapes layered below it. The bottom left corner transitions into a light grey area.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

An illustration featuring two blue hands holding a yellow scroll with a green band. The background is a gradient of orange and blue.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Kanwil DJKN Suluttenggomalut
- D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah DJKN Suluttenggomalut merupakan unit vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208). Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Gambar 1.1. Gedung Keuangan Negara Manado

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk penerapan asas akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

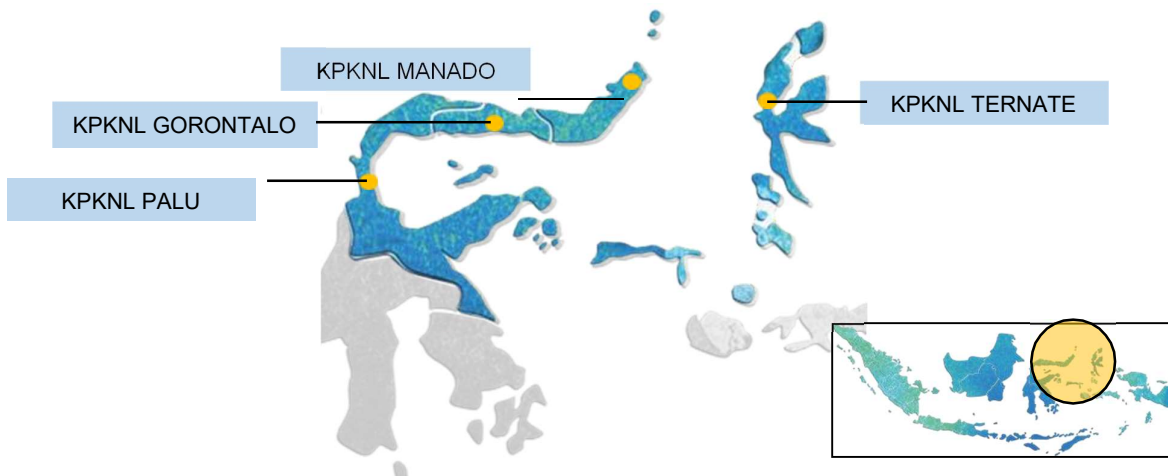
Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini disusun sebagai satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan/atau sasaran strategis Kanwil DJKN Suluttenggomalut dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208), DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang,
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang,
6. Pelaksanaan administrasi DJKN, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kanwil DJKN Suluttenggomalu merupakan Unit Eselon II di lingkungan DJKN, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lantai 5, Jalan Bethesda Nomor 6-8, Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah kerja serta unit instansi vertikal di bawah Kanwil DJKN Suluttenggomalu, yang disebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), meliputi KPKNL Manado, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, dan KPKNL Ternate.



Gambar.1.2 Wilayah Kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalu

Kanwil DJKN Suluttenggomalu menetapkan visi untuk menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah

ditetapkan, Kanwil DJKN Suluttenggomalut memiliki 5 (lima) misi yang diemban dan harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara,
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum,
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara,
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut juga telah mengikrarkan moto dalam bekerja, yaitu **BENTENAN** yang merupakan singkatan dari **Bersih, Energik, Terpercaya, dan Akuntabel**. Kata BENTENAN terinspirasi dari salah satu motif batik khas Sulawesi Utara.



Gambar 1.3. Moto Kanwil DJKN Suluttenggomalut BENTENAN

Kanwil DJKN Suluttenggomalut dipimpin oleh Kepala Kantor, Indriasari Sundoro, dengan dibantu oleh para Pejabat Administrator yang terdiri dari Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi dan Kepala Bidang Lelang sekaligus merangkap Plt. Kepala Bidang Piutang Negara, dan didukung oleh Para Pejabat Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Ahli Pertama dan Penilai Ahli Muda.

Setiap bagian/bidang di Kanwil DJKN Suluttenggomalut memiliki tugas masing-masing, yaitu:

1. Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut,
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi di bidang kekayaan negara, serta mengkoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut,
3. Bidang Piutang Negara (PN) yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi pengelolaan piutang negara,
4. Bidang Penilaian yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian,
5. Bidang Lelang yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan

penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang,

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi, dan hubungan masyarakat, dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Suluttenggomulut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJKN Suluttenggomulut didukung oleh 43 (empat puluh tiga) sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 (tujuh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan berbagai latar belakang bidang ilmu dan keahlian seperti ilmu ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, sosial dan lainnya. Adapun komposisi pegawai, sebagaimana data SIMPEG per tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	4
D1	2
D3	5
D4 / S1	19
S2	13
S3	0
JUMLAH	43

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-laki	30
Wanita	13
Jumlah	43

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

USIA	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	5	1	0	6
31-40	0	0	12	0	12
41-50	0	0	5	4	9
>50	0	1	12	3	16
JUMLAH	0	6	30	7	43

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Usia

C. PERAN STRATEGIS KANWIL DJKN SULUTTENGOMALUT

Kanwil DJKN Suluttenggomalut memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara. Adapun gambaran peran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan kekayaan negara. Sebagai pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN Suluttenggomalut memiliki peran untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara, dan difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan, dan penatausahaan kekayaan negara. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Kanwil DJKN Suluttenggomalut selaku pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel,
2. melakukan penilaian kekayaan negara. Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian kekayaan negara meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi, dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, penerbitan surat berharga oleh negara, dan pengurusan piutang negara,
3. memberikan pelayanan piutang negara. Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan serta sebab apapun,
4. memberikan pelayanan lelang. Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana penjualan sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa peraturan perundangan dan sebagai alternatif sarana transaksi penjualan aset kepada masyarakat. Dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, lelang dicantumkan sebagai cara pelaksanaan putusan atau ketentuan peraturan perundangan tersebut. Lelang dipilih sebagai cara penjualan karena sifatnya yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa risalah lelang. Peningkatan kualitas layanan, regulasi, pengawasan, penggalan potensi dan kemudahan pelaksanaannya terus menerus dilakukan dengan tujuan agar lelang menjadi sarana penjualan yang digunakan secara luas oleh masyarakat (*sales mean auction*),
5. memberikan kontribusi melalui PNBP ke kas negara yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara, biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara, serta Bea Lelang yang diperoleh dari setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang di Indonesia.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut yaitu:

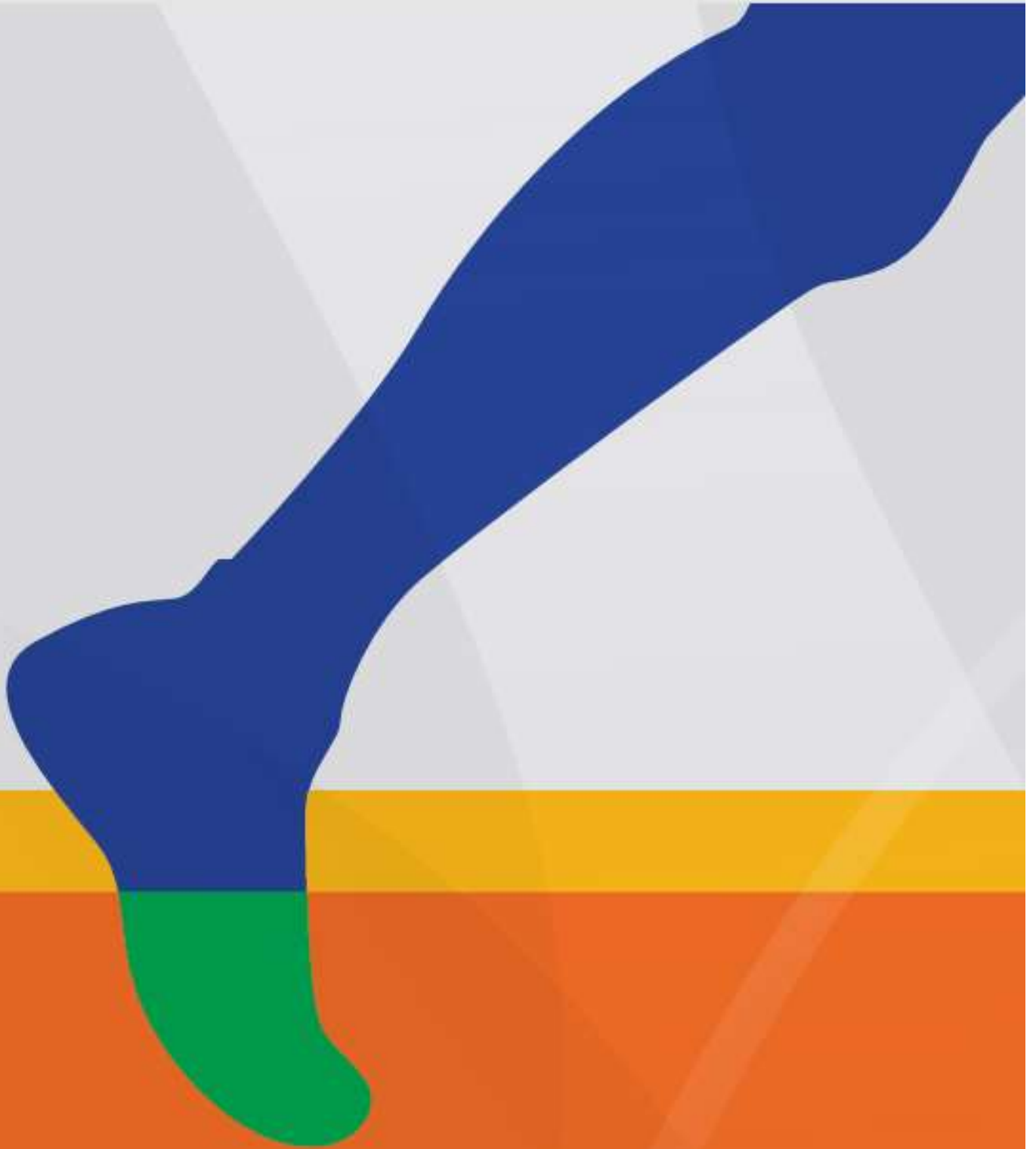
1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya,
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
4. Penerapan Tata Kelola aset yang efektif
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
7. Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami Laporan Kinerja ini, sistematika Laporan Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut disusun dalam kerangka sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipasinya.
BAB I – PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II – PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025.
BAB IV – PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kanwil DJKN Suluttenggomalut untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang optimis dalam mencapai target-target di tahun yang akan datang.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Pengukuran Kinerja

BAB II RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara *integral*, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. DJKN telah merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Penyusunan rencana strategis DJKN mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam rencana strategis DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara. Salah satu kondisi yang menjadi pertimbangan DJKN dalam penyusunan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Rencana Strategis DJKN disusun dalam kurun waktu 2025-2029 yang tentu saja sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan serta tujuan organisasi, maka ditetapkan pula Visi DJKN untuk tahun 2020-2024.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang merupakan DJKN sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dimaksud dengan akuntabel dan produktif. Akuntabel adalah

pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Produktif artinya mampu memberikan hasil yang berdampak maksimal, berkualitas, efektif dan efisien. Adapun SDM DJKN diharapkan dapat memiliki karakter inovatif .

VISI DJKN

Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan inovasi pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko untuk mendorong tata kelola pembangunan yang baik melalui Misi sebagai berikut:

MISI DJKN

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat finansial dan sosial
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advitori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Dengan beragam tugas dan fungsi di DJKN, menjadi tantangan untuk mewujudkan DJKN sebagai organisasi dengan proses bisnis *modern* dan organisasi yang *multitasking*. Kondisi-kondisi yang ingin dicapai tidaklah sederhana, sehingga membutuhkan upaya kerja keras dalam mewujudkannya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJKN Suluttenggomalu telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu yang mengacu pada Sasaran Strategis DJKN yang telah ditetapkan, yaitu di antaranya:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel
 - c. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional;
 - d. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah layanan penilaian dan advitori yang profesional dan relevan.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan tepercaya adalah Layanan lelang yang efisien, inklusif, dan kredibel.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal,
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, Kanwil DJKN Suluttenggomalut perlu membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yaitu:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif , Adaptif, dan Terpercaya
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif
Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif
Pengawasan dan Pengendalian internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Sasaran strategis Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Suluttenggomalut, yang digambarkan sebagai berikut:

PETA STRATEGI KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT 2025



Gambar 2.1. Peta Strategi Kanwil DJKN Suluttenggomalut

Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat, yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Peta Strategi DJKN menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Stakeholder Perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. **Customer Perspective** berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. **Internal Process Perspective** berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilakukan. Sedangkan **Learning and Growth Perspective** berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Melalui Peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis Kanwil DJKN Suluttenggomalut berjumlah 8 (delapan) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp83,1 m)

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,0 T)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,7 M)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, Kanwil DJKN Suluttenggomalut berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen)
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/ kuning/ hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

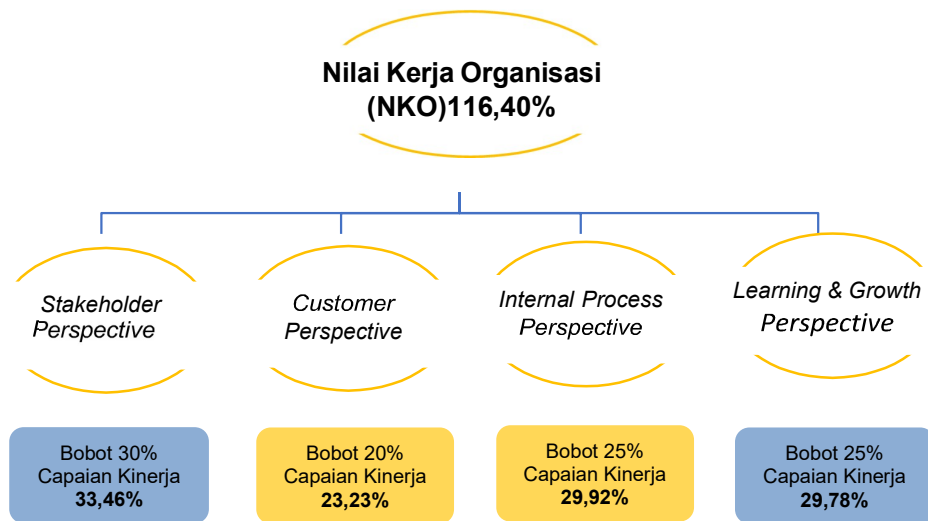
- A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT
- B. ANALISIS KEBERHASILAN DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA
- C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
- D. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI/ MITIGASI RISIKO
- E. RENCANA AKSI KE DEPAN
- F. REALISASI ANGGARAN
- G. PRESTASI KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut selama tahun 2025 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian IKU, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi dan penghargaan yang memberikan manfaat, baik kepada internal organisasi maupun pihak eksternal. Kanwil DJKN Suluttenggomalut senantiasa melakukan evaluasi internal melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sebagai upaya monitoring capaian kinerja dan mitigasi risiko.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KANWIL DJKN SULUTTENGOMALUT

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025 terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,40%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut:



Gambar 3.1. Capaian Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut (masing-masing Perspektif)

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

CAPAIAN IKU KANWIL DJKN SULUTTENGOMALUT TAHUN 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya									111,55	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,32	19,00%	57,58%	105,32	105,32	60,64	111,55
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	126,48%	14,00%	42,42%	126,48	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal									112,30	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	116,78%	19,00%	36,54%	116,78	116,78	42,67	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	102,15%	19,00%	36,54%	102,15	102,15	37,32	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	216,30%	14,00%	26,92%	216,30	120,00	32,31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa									120,00	
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	99,01	14,00%	33,33%	128,59	120,00	40,00	116,15
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	108,34	14,00%	33,33%	146,41	120,00	40,00	
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	Max	P/M	70,00	87,78	14,00%	33,33%	125,41	120,00	40,00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif									119,38	
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	139,52%	14,00%	50,00%	139,52	120,00	60,00	
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	118,75%	14,00%	50,00%	118,75	118,75	59,38	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif									120,00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Max	P/M	100%	123,36%	14,00%	33,33%	123,36	120,00	40,00	119,69
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	109,08%	14,00%	33,33%	155,83	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	118,67%	14,00%	33,33%	148,34	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif									120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	125,22	14,00%	33,33%	125,22	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	100,00%	14,00%	33,33%	125,00	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif									120,00	
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Max	P/M	3,55	5,59	14,00%	50,00%	157,60	120,00	60,00	119,12
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	120,78	14,00%	50,00%	120,78	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif									117,36	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	96,22	14,00%	50,00%	120,28	120,00	60,00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100,00	114,72	14,00%	50,00%	114,72	114,72	57,36	
NKO											116,40

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Suluttenggomalut dari tahun ke tahun selalu di atas 100, dengan capaian selama periode 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

NKO Kanwil DJKN Suluttenggomalut 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi	Keterangan
2021	114,62 (HIJAU)	Dari 19 IKU semuanya merupakan IKU Hijau
2022	114,81 (HIJAU)	Dari 20 secara keseluruhan semuanya merupakan IKU Hijau
2023	115,00 (HIJAU)	Dari 20 IKU secara keseluruhan, 19 IKU Hijau, dan 1 IKU Kuning
2024	115,57 (HIJAU)	Dari 20 IKU secara keseluruhan, 19 IKU Hijau, dan 1 IKU Kuning
2025	116,40 (HIJAU)	Dari 20 IKU secara keseluruhan Hijau

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut selama 5 Tahun Terakhir

Secara grafik, Perkembangan NKO Kanwil DJKN Suluttenggomalut dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Nilai Kinerja Organisasi

Gambar 3.3. Capaian Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut

Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025 mengalami perubahan dengan adanya adendum pada IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara dikarenakan telah tercapainya target tahunan di Triwulan 3 pada seluruh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut dari target awal Rp3.752.000.000 menjadi sebesar Rp4.689.833.000 dengan capaian pada triwulan 3 sebesar Rp 10.144.230.614,65 dengan prosentase 216,30%.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

IKU 1a-CP – Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan anti korupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari internal (pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi anti korupsi serta transparansi) dan eksternal (upaya pencegahan korupsi, transparansi dan keadilan layanan serta integritas pegawai). IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomlut	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100,00	100,00	MAX/TLK
Realisasi	100,00	100,00	100,00	156,00	156,00	105,32	105,32	
Capaian	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	105,32	105,32	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.4. Indeks Integritas

Perbandingan Capaian IKU Indeks Integritas

Tahun	Target	Realisasi
2023	88.67	89.17
2024	89.17	92.44
2025*	100.00	105.32

sumber: data olahan

*berasal dari olahan *raw data*

Dalam target indeks integritas tahun 2025 memiliki subkomponen pencapaian iku atas nilai indeks integritas hasil survey KPK dan apresiasi yang berasal dari kegiatan tindak lanjut hasil SPI tahun sebelumnya, realisasi kegiatan pencegahan. Untuk target indeks survey pada tahun 2025 (*raw data*) adalah 89,37 dengan capaian indeks survey KPK adalah 91,89 dan apabila ditambahkan nilai apresiasi 5 poin, maka hasil indeks integritas akhir adalah 94,09. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, ada kenaikan 1,65. Indeks integritas terus mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir dan disebabkan karena kenaikan hasil survey integritas yang tercermin dari perbaikan persepsi responden internal dan eksternal terhadap komponen penilaian integritas DJKN dan faktor apresiasi.

1b.CP - Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi dan/atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber

daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBPN Pengelolaan BMN. Nilai penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan yang bersumber dari BMN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan BMN terdiri atas:
 - a. Penggunaan BMN (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil *audit* dan telah disetorkan ke kas negara),
 - b. Pemanfaatan BMN, dan
 - c. Pemindahtanganan BMN, yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja (satker) atau K/L bersangkutan dan KPPN/Kanwil DJPb. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan yang terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN.

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor ND-168/KN.2/2022 tanggal 22 Februari 2022 hal Penyampaian Target Pengukuran Kinerja Tahun 2022 untuk Penerimaan Negara yang Bersumber dari BMN dan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), disampaikan bahwa selain sumber PNBPN di atas, Kanwil DJKN/KPKNL menghimpun pula data penerimaan Negara dari BMN yang bersumber dari:

- a. Penyelesaian klaim asuransi BMN,
 - b. Penjualan Barang Rampasan/Tegahan, dan
 - c. Pendapatan BLU lainnya,
2. PNBPN Piutang Negara (PNBP PN). PNBPN ini diperoleh dari biaya administrasi pengurusan piutang negara yang dibayarkan oleh debitur atau penanggung hutang ke kas negara,
 3. PNBPN Lelang. Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kantor Wilayah dan KPKNL berupa:
 - a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian,
 - b. Bea lelang batal atas permintaan penjual,
 - c. Biaya permohonan lelang,
 - d. Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang,
 - e. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
 - f. Perizinan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II,
 - g. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang,
 - h. Kertas *security* untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II, dan
 - i. Penggantian surat perizinan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II yang hilang/rusak.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang di atas adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Hal yang menjadi perhatian dalam pencapaian IKU ini adalah kewenangan pemberian persetujuan/penolakan atas pengelolaan BMN dan penerbitan Penetapan Status Pengguna yang diberikan kepada Kanwil DJKN sangat terbatas. Serta penelusuran identitas debitur potensial khususnya terhadap debitur yang berbentuk badan dan kebijakan relaksasi pembayaran hutang oleh pemerintah.

Beberapa akar permasalahan dalam IKU ini antara lain:

1. Rendahnya potensi PNBPN dari pengelolaan BMN karena tingkat pemahaman Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan optimalisasi BMN baik dari segi Penggunaan, Pemanfaatan. Pemindahtanganan dan bentuk pengelolaan lainnya masih rendah,
2. Setiap provinsi di lingkup wilayah kerja Suluttenggomalu memiliki variasi potensi sumber PNBPN yang berbeda sehingga bentuk penerapan pengelolaan kepada satuan kerja bervariasi,
3. Fungsi sinergi, supervisi, bimbingan teknis/sosialisasi/internalisasi, pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN selaku pengelola barang belum terintegrasi,
4. Pemetaan BMN yang terindikasi *idle* sebagai potensi PNBPN masih perlu ditingkatkan dalam pemantauan periodik dan insidental pada Pengguna Barang,
5. Banyak Lelang tidak ada penawaran (TAP),
6. Potensi lelang masih belum tergalikan secara optimal.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan KPKNL terkait dengan Data Realisasi Penerimaan Negara yang berasal dari Pengelolaan BMN, termasuk meminta masing-masing KPKNL untuk melakukan pemetaan terhadap potensi penerimaan s.d. akhir tahun anggaran,
2. Membuat ND penggalian potensi lelang kepada *stakeholder*/KPKNL wilayah Suluttenggomalu,
3. Melakukan *money capaian kinerja* pada aplikasi *sharing folder dropbox*,
4. Rekap data capaian kinerja lelang PL Kelas I dan PL Kelas II jajaran Kanwil DJKN Suluttenggomalu,
5. Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait himbauan kepada satuan kerja untuk segera mengeksekusi BMN yang telah diterbitkan surat persetujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan.

Target dan realisasi yang dicapai oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalu untuk IKU ini, dapat dirincikan sebagai berikut :
Persentase Penerimaan Negara - PNBPN (Pengelolaan KN dan Lelang)

Jenis PNBPN	Target	Realisasi
PNBPN BMN (Aset)	100% (Rp59.208.000.000)	139,28% (Rp82,465.592.054)
PNBPN PN	100% (Rp30.800.000)	117,91% (Rp36,317,042)
PNBPN Lelang	100% (Rp23.870.000.000)	94,73% (Rp22,610,966,474)
TOTAL	100% (Rp83.108.800.000)	126,48% (Rp105.112.875,570,)

sumber: data olahan

Target tersebut dapat dicapai berkat sinergi, kerja sama dan kerja keras dari semua pihak, khususnya Bidang PKN, Bidang PN, dan Bidang Lelang, yang mengambil peran besar dalam tercapainya IKU ini. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. FGD Monev Capaian IKU PKN, Evaluasi Kinerja Lelang Tahun 2025 dan Strategi Lelang Tahun 2025,
2. Berkoordinasi dengan Pegadaian, perbankan/lembaga pembiayaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, BLU serta pihak terkait lainnya terkait realisasi dan data PNBPNP,
4. Penggalan potensi PNBPNP yang bersumber dari pengelolaan BMN, Piutang Negara, dan Lelang,
5. Optimalisasi pemasaran lelang (melalui *broadcast whatsapp*, katalog, dan Portal Lelang) secara rutin.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomallut								
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya								
1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang- PNBPNP BMN								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	278,59%	113,82%	113,82%	130,22%	130,22%	139,28%	139,28%	
Capaian	120%	113,82%	113,82%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Kanwil DJKN Suluttenggomallut								
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya								
1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang- PNBPNP PN								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	314,08%	167,33%	167,33%	118,77%	118,77%	117,91%	117,91%	
Capaian	120%	120%	120%	118,77%	118,77%	117,91%	117,91%	

Kanwil DJKN Suluttenggomallut								
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya								
1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang- PNBPNP Lelang								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	162,56%	92,49%	92,49%	86,57%	86,57%	94,73%	94,73%	
Capaian	120%	92,49%	92,49%	86,57%	86,57%	94,73%	94,73%	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.5. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Perbandingan Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Capaian
2021	100%	129%	55.389.279.378
2022	100%	135,03%	58.942.942.723
2023	100%	131,77%	72,818,056,007
2024	100%	129,49%	76,304,735,310
2025	100%	139,28%	105.112.875,570

Peningkatan capaian kinerja IKU realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang didukung oleh capaian kinerja PNBPNP aset yang cukup tinggi yang meningkat dari Rp55 miliar menjadi Rp82 miliar serta PNBPNP lelang yang meningkat dari Rp20,5 miliar menjadi Rp22,6 miliar, walaupun ada penurunan capaian kinerja PNBPNP PN dari Rp91 juta menjadi Rp36 juta. Kontribusi peningkatan kinerja PNBPNP aset sebagian

besar terjadi pada penerimaan dari pemanfaatan aset dan pengelolaan aset BLU.

IKU 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

IKU ini mempunyai definisi yaitu Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Tujuan dari IKU ini adalah Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan dengan penggunaan atau pemanfaatan atas hasil evaluasi SBSK pada BMN yang kutang/tidak optimal.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggmalut	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
	Sub IKU Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan				Sub IKU Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan			
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	68,87%	104,19%	104,19%	95,45%	95,45%	116,78%	116,78%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,31%	119,31%	116,78%	116,78%	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.6. Persentase Tingkat Optimalisasi Aset Negara

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga belum dapat dilakukan analisa perbandingan capaian pada tahun sebelumnya. Capaian yang kurang/tidak optimal disebabkan karena adanya target BMN yang memang tidak dapat ditetapkan status penggunaannya atau dimanfaatkan karena penggunaan utamanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta bangunan yang telah rusak berat karena kondisi/umur bangunan dan juga karena bencana.

IKU 2b.CP – Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tujuan strategis dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Sumber data yang digunakan adalah rekapitulasi laporan realisasi kegiatan dan hasil pelaksanaan lelang.

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Target yang ditetapkan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut untuk IKU ini di tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan nilai pokok lelang sebesar Rp 1.012.612.000.000,- Kanwil DJKN Suluttenggomalut dengan capaian realisasikan **102,15%** dari target yang telah ditetapkan atau Rp 1.034.368.735.807,-

Beberapa akar permasalahan dalam penyelesaian tugas IKU ini antara lain :

1. Masih banyaknya lelang TAP,
2. Objek lelang dinilai kurang *marketable*,
3. Adanya pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pemohon Lelang,
4. Adanya SKPT yang tidak terbit karena adanya kendala di BPN serta tidak adanya koordinasi yang baik antara perbankan dengan pihak kantor pertanahan setempat,
5. Adanya Pembeli Lelang yang wanprestasi.

Ketepatan waktu penyelesaian permohonan dan pelayanan yang diberikan perlu ditingkatkan. Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN, kewenangan pemberian persetujuan/penolakan atas pengelolaan BMN dan penerbitan Penetapan Status Pengguna yang diberikan kepada Kanwil DJKN sangat terbatas, dan tidak dapat diprediksi Kanwil DJKN selaku Pengelola Barang menerima permohonan pengelolaan BMN.

Sementara itu terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target dalam IKU ini adalah:

1. Membuat nota dinas penggalian potensi kepada para *stakeholders* serta KPKNL,
2. Melakukan koordinasi serta penggalian potensi secara langsung (*on the spot*) kepada para *stakeholders*,
3. Melakukan monev capaian kinerja pada aplikasi *sharing dropbox* dengan meningkatkan frekuensi periode monev untuk mengantisipasi rendahnya capaian sejak dini,
4. Melakukan rekapitulasi data capaian kinerja lelang PL Kelas I dan PL Kelas II jajaran Kanwil DJKN Suluttenggomalut,
5. Melakukan FGD Evaluasi Kinerja Lelang Tahun 2025 dan Strategi Lelang Q1 sd Q4 Tahun 2025.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalut	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	167,02%	99,87%	99,87%	93,79%	93,79%	102,15%	102,15%	
Capaian	120%	99,87%	99,87%	93,79%	93,79%	102,15%	102,15%	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.7. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Perbandingan IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target		Realisasi	
	%	Rp	%	Rp
2021	100	637.000.000.000	175,00	1.114.476.580.479
2022	100	639.000.000.000	150,79	963.518.869.173
2023	100	964.300.000.000	99,83	962.663.624.615
2024	100	1.012.612.000.000	87,16	882,562,430,422
2025	100	1.012.612.000.000	100,93	1.022.073.837.807

sumber: Data olahan

Capaian IKU pokok lelang didukung oleh kenaikan realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang kelas I/KPKNL dari tahun 2024 sebesar Rp209 miliar menjadi Rp243 miliar pada tahun 2025 dan ralisasi pokok lelang Pejabat Lelang kelas II dari tahun 2024 sebesar Rp99 miliar menjadi Rp238 miliar pada tahun 2025. Untuk realisasi pokok lelang pengadaan terus menurun dari sejak tahun 2023 sebesar 790 miliar, tahun 2024 sebesar Rp.574 miliar dan tahun 2025 menjadi Rp552 miliar.

IKU 2c-CP – Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Persentase Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi *FocusPN*, dengan komponen, sebagai berikut:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat), atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat));
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL.

IKU ini bertujuan untuk percepatan penurunan saldo piutang negara pada K/L/Pemda maupun piutang negara pada badan /lembaga khusus/badan hukum publik yang sedang diurus PUPN.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalat	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	396,13%	276,15%	276,15%	209,25%	209,25%	216,30%	216,30%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.8. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Perbandingan Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	136,00%
2022	100% 2.803.000.000	146,26% 4.499.717.113
2023	100% 8.282.134.353	134,86% 11.169.673.685
2024	100% 4.491.200.000	237,94% 10.686.460.406
2025	100% 4.870.964.000	216,30% 10.132.538.090

Capaian IKU ini sangat tergantung pada jumlah saldo/sisa outstanding piutang negara pada masing-masing KPKNL. IKU ini sempat dilakukan addendum pada triwulan III dari target Rp3,7 miliar menjadi Rp4,8 miliar karena capaian yang sudah melebihi 100%. Selama 3 tahun terakhir, penurunan saldo outstanding piutang negara dapat dicapai dengan angka yang konsisten 10 s.d. 11 miliar rupiah. Capaian ini didukung oleh capaian pelunasan pada BKPN di KPKNL Ternate dan BKPN PSBDT dan pengembalian BKPN pada KPKNL Manado.

Sasaran Strategis 3 Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

IKU 3a-N – Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Dalam IKU ini, Indeks kepuasan penggunaan layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik. Komponen yang diukur antara lain Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana Prasarana
9. Sarana Pengaduan

Kanwil DJKN Suluttenggomlut pada tahun 2025, berhasil meraih capaian Rata-rata Indeks Kepuasan pengguna layanan sebesar **99,01** melampaui target sebesar 77, dan indeks capaian sebesar 120%.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomlut	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	MAX/TLK
Realisasi	99,45	99,13	99,13	98,68	98,68	99,01	99,01	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3.9 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Perbandingan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Tahun	Target	Realisasi
2021	4.7	4.85
2022	4.7	4.90
2023	-	97.94/ 4,89
2024	-	99.46/ 4,97
2025	77	99.01/ 4,95

Dalam 5 tahun terakhir capaian survey kepuasan pengguna layanan/survey kepuasan masyarakat pada Kanwil DJKN Suluttenggomlut konsisten menunjukkan angka 4,85 s.d. 4,97 (skala 5) atau sangat baik. Naik turunnya hasil survey tidak signifikan. Hal ini disebabkan Kanwil DJKN Suluttenggomlut tetap konsisten dan terus meningkatkan kualitas layanannya terkait dengan persyaratan, kemudahan,

kesesuaian waktu layanan, biaya, petugas layanan, sarana dan saluran aduan kepada para penerima layanan.

IKU 3b-N- Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

IKU ini berkaitan dengan Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelol aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							Pol/KP
	3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4		
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/TLK
Realisasi	97,11	102,14	102,14	105,91	105,91	108,34	108,34	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I"

Tabel 3.9. Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga tidak memiliki riwayat capaian tahun sebelumnya. Capaian IKU dapat direalisasikan dengan optimal dengan peningkatan edukasi terkait pelayanan tugas dan fungsi kepada stakeholder baik di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang serta penilaian.

IKU 3c-N- Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

IKU ini berkaitan dengan pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelol aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

Sebagaimana amanat PemenPANRB No11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, Roadmap DJKN (2014-2019) "Distinguished Asset Manager", butir-butir Rakernas Tahun 2023 (Pengembangan Fungsi DJKN sebagai Asset Advisory kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), dan Rekomendasi Stakeholder dari "DJKN Mendengar" yang mana DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Urgensi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan

Standar Penilaian yang berlaku di dunia penilaian, unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN) menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di Luar DJKN.

Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patutlah segera dilakukan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di Instansi Pengguna semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain itu variasi objek penilaian bertambah sesuai dengan asset pada masing-masing Instansi Pengguna. Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, baik di Kementerian/Lembaga/Daerah Lainnya diproyeksikan meningkat dikarenakan kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin meningkat sehingga perlu adanya peran Unit Vertikal DJKN dalam meningkatkan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
4. Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
5. Monitoring dan Evaluasi.

Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah Non DJKN dilakukan terpusat oleh DJKN dan peserta verkom pada tahun ini adalah Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga lain. Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimtek dan hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah Kerjanya;
2. Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN. Tujuan IKU ini yaitu memelihara kualitas penilai pemerintah.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalat	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	3c-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	MAX/AVG
Realisasi	120,00	96,00	96,00	96,00	96,00	87,78	87,78	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.10. Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025, sehingga tidak memiliki riwayat capaian di tahun sebelumnya. Capaian IKU ini berasal dari nilai verifikasi komeptensi penilai sebesar 75,46 (bobot 40%) dan tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis penilaian sebesar 96 (bobot 60%).

Sasaran Strategis 4 Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

IKU 4a-CP – Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertifikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertifikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertifikat yang *clean and clear* (K1), Melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI cq KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikat BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai

IKU bertujuan mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	April-Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	16,67%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	11,99%	52,98%	52,98%	72,30%	72,30%	139,52%	139,52%	
Capaian	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I”

Tabel 3.11. Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

Perbandingan Capaian IKU
Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan

Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	105%
2022	100%	115.37%
2023	100%	133.62%
2024	100%	173.95%
2025	100%	139.52%

Capaian IKU tersebut secara konsisten dapat dicapai di atas 120, walaupun secara jumlah unit pada capaian menurun dari 3.472 pada tahun 2024 menjadi 1.617 pada tahun 2025. Hal ini disebabkan jumlah target Sertifikasi BMN tanah yang terus menurun karena tersisa pada BMN tanah yang bermasalah/sengketa.

IKU 4b-N – Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalui Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025. Tujuan dari IKU ini adalah Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset

Kanwil DJKN Suluttenggomalu berhasil melampaui target sebesar 118,75 % dari 100% target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	79,50%	83,54%	83,54%	95,83%	95,83%	118,75%	118,75%	
Capaian	120%	120%	120%	120,00%	120,00%	118,75%	118,75%	

Tabel 3.12. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

**Perbandingan Capaian IKU
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	117%
2022	100%	119.17%
2023	100%	133.35%
2024	100%	120%
2025	100%	118.75%

sumber: Data olahan

Capaian IKU pada tahun 2025 sebesar 118,75 menurun sedikit dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebesar 120. Hal ini disebabkan adanya target BMN pada wilayah KPKNL Palu yang lokasinya jauh dan mempunyai akses dan keterjangkauan transportasi yang terbatas sehingga belum dapat dilakukan evaluasi kinerja BMN.

**Sasaran Strategis 5
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional dan Produktif**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

IKU 5a-CP – Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan

efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Target di 2025 sejumlah 295 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Dari target 64% yang ditetapkan di awal tahun, Kanwil DJKN Suluttenggomlut pada tahun 2025 berhasil merealisasikan penyelesaian berkas kasus piutang negara sebesar 123,36%.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomlut	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							Pol/KP
	5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	146,43%	118,94%	118,94%	115,93%	115,93%	123,36%	123,36%	
Capaian	120,00%	118,94%	118,94%	115,93%	115,93%	120,00%	120,00%	

Tabel 3.13 Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Perbandingan Capaian IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	136%
2022	100%	146.26%
2023	100%	134.86%
2024	100%	237.94%
2025	100%	123.36%

Peningkatan capaian pada tahun 2023-2024 atas IKU Penyelesaian BKPN karena adanya Crash Program/keringanan utang, kebijakan Crash Program terus terbukti efektif dalam memulihkan kas negara dan mengurangi jumlah outstanding BKPN. Crash Program mampu mempercepat tercapainya IKU Penyelesaian BKPN.

Pada tahun 2025 terjadi penurunan atas capaian IKU Penyelesaian BKPN walaupun tetap dapat menjadi 120. Hal ini karena sisa outstanding kualitas BKPN nya tidak ditunjang dengan barang jaminan, alamat debitur tidak ditemukan/sudah pindah alamat/tidak diketahui, keadaan ekonomi debitur yang kurang mampu, dan debitur yang sudah meninggal dan ahli waris tidak ada kemampuan untuk membayar utang.

IKU 5b-CP – Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MIN/TLK
Realisasi	112,03%	108,47%	110,25%	109,77%	109,77%	109,08%	109,08%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tabel 3.14 Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

IKU ini merupakan IKU baru yang mempunyai 3 sub komponen IKU yaitu norma waktu layanan penilaian (40%), akurasi data layanan penilaian (30%) dan nilai hasil kaji ulang (30%). Capaian IKU ini dapat dicapai optimal karena tingginya kepatuhan penyelesaian permohonan penilaian, data penilaian yang akurat pda SIP dan Satu Kemenkeu serta penyelesaian semua permohonan kaji ualgn yang dimohonkan ke kantor wilayah.

IKU 5c-CP – Persentase Produktivitas Lelang

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang

Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Dari target sebesar 80% yang telah ditetapkan, Kanwil DJKN Suluttenggomalu berhasil merealisasikan capaian sebesar 118,67%, sehingga Indeks Capaian bisa mencapai sebesar 120,00%

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	49,27%	65,16%	65,16%	95,15%	95,15%	118,67%	118,67%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tabel 3.15 Persentase Produktifitas Lelang

Perbandingan Capaian IKU Persentase Produktifitas Lelang

Tahun	Target	Realisasi
2021	35%	41.99%
2022	36%	39.20%
2023	80%	104,34%
2024	89%	114.65%
2025	80%	118.67%

IKU ini tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan peningkatan capaian pada frekuensi lelang sebesar 117% dan tingkat laku lelang terutama pada lelang eksekusi non HT, Pailit dan Pengadilan serta Lelang noneksekusi wajib.

Sasaran Strategis 6 Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif

IKU 6a-CP – Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Tujuan IKU ini adalah Mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran.

Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil membuat Kanwil DJKN Suluttenggomalu berada dibawah target yang telah ditetapkan, dan bisa mencapai realisasi yaitu **120**.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I

Tabel 3.16. – Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Tahun	Target	Realisasi
2021	95,5%	96,95
2022	95,50%	97,97%
2023	100	118.32%
2024	100%	120%
2025	100%	120%

Capaian atas IKU ini konsisten di angka 120 karena realisasi yang optimal pada kualitas perencanaan dan penganggaran (Revisi dan Deviasi hal.III DIPA), implementasi pelaksanaan anggaran (penyerapan) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output).

IKU 6b-N – Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Tujuan dari IKU ini Adalah untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120,00	131,43	131,43	135,00	135,00	125,22	125,22	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3.17 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025. Pencapaian IKU ini didukung oleh realisasi pada penyelesaian input SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), realisasi e-purchasing katalog dan penyelesaian kegiatan pengadaan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing.

IKU 6c-N – Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Isu utama dalam IKU ini adalah adanya pegawai yang belum mengikuti pengembangan kompetensi dan pegawai yang belum memenuhi *hard competency*. IKU ini mengukur jumlah pegawai yang telah memenuhi standar *hard competency* dan pengembangan kompetensi. Untuk *hard competency* mengukur kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti. Pegawai dikategorikan telah memenuhi kriteria apabila telah memenuhi minimal 25 JP. Implikasinya adalah target pemenuhan SDM yang kompeten masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan Kanwil DJKN Suluttenggomalu untuk penyelesaian IKU ini antara lain:

1. Membuat Nota Dinas pemanggilan peserta pelatihan kepada bagian/bidang,
2. Melaporkan kegiatan pengembangan kompetensi dan habituasi yang telah diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomalu
3. Membuat Nota Dinas kepada bagian/bidang terkait jumlah Elearning yang telah diikuti
4. Melakukan pemutakhiran jabatan pada HRIS guna kesesuaian pemanggilan diklat dan tusi
5. Kegiatan belajar melalui sharing session
6. Mengusulkan RAP Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kinerja kepada Pusdiklat KU

Permasalahan dari IKU ini adalah adanya mutasi pejabat/pegawai yang mengakibatkan penempatannya belum sesuai dengan *hard competency*. IKU ini juga telah merekomendasikan rencana aksi pada tahun berikutnya sebagai berikut:

1. Mengusulkan pegawai yang berminat mengikuti pelatihan dan melakukan pemanggilan peserta pemanggilan kepada bagian/bidang
2. Membuat laporan pengembangan kompetensi dan habituasi yang telah diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Kanwil DJKN Suluttenggomalu
3. Penyampaian Nota Dinas kepada bagian/bidang terkait jumlah Elearning yang telah diikuti
4. Melakukan pemutakhiran jabatan pada HRIS guna kesesuaian pemanggilan diklat dan tusi
5. Kegiatan belajar melalui sharing session
6. Melaksanakan Mengusulkan RAP Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kinerja kepada Pusdiklat KU

Kanwil DJKN Suluttenggomalu berhasil memperoleh realisasi sebesar **100%** atau sebesar **80,00%** dari besaran target tahun 2025 dan memperoleh capaian sebesar **120,00%**

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalu	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							Pol/KP
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	30,81%	80,54%	80,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Tabel 3.18. – Persentase pengembangan kompetensi pegawai

**Perbandingan Capaian IKU
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	120%
2022	100%	120%
2023	-	-
2024	100%	120%
2025	100%	120%

Capaian atas IKU konsisten optimal sejak tahun 2021 sampai dengan 2025. Capaian ini didukung oleh pemenuhan jam pelatihan pegawai dan pemenuhan pemanggilan pelatihan dari kantor pusat DJKN.

**Sasaran Strategis 7
Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik Yang Efektif**

IKU 7a-CP – Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 3 (tiga) unsur pengukuran, diantaranya:

1. Partiiipasi Agenda Setting dengan subkomponen implementasi taktik komunikasi publik (bobot 50%) dan jumlah postingan di media sosial dengan acuan baseline (bobt 50%).
2. *Employee Advocacy* (pemangku tugas komunikasi) dengan subkomponen amplifikasi sesuai topik agenda setting dan survey awareness isu-isu Kementerian keuangan.

Isu utama serta permasalahan yang terjadi pada penyelesaian IKU ini antara lain:

1. Capaian unsur *Employee Advocacy* dihitung berdasarkan jumlah amplifikasi/partisipasi yang dilakukan pegawai yang ditunjuk sebagai Pemangku Tugas Komunikasi,
2. Adanya potensi bahwa para pegawai lupa/lalai untuk melakukan amplifikasi sehingga Seksi Informasi selaku koordinator harus memastikan dan mengingatkan para pegawai untuk melakukan amplifikasi secara tepat waktu dan turut melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut,
3. Beberapa pegawai yang tidak memiliki akun media sosial yang diminta sebagai media melakukan amplifikasi (contoh: X atau Twitter) atau tidak aktif serta memiliki akun media sosial,
4. Bagi beberapa pegawai cara melakukan amplifikasi dan sistem pelaporan cukup sulit & kurang sederhana.
5. Dalam satu waktu terdapat beberapa topik yang perlu diamplifikasi oleh pegawai,

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah melakukan sejumlah upaya antara lain:

1. Melakukan amplifikasi *Agenda Setting* Kemenkeu pada media sosial Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan menghimbau KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut untuk turut melakukan amplifikasi topik-topik yang tersaji,

2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor Kep-44/KN/2024 tentang Pembentukan Tim Advokasi Pegawai (Employee Advocacy) Kementerian Keuangan Tahun 2025 di Lingkungan DJKN dan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Pembentukan Kelompok Kerja Pemangku Tugas Employee Advocacy Kementerian Keuangan Satu Tahun 2025 di Lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang mana kedua Surat Keputusan tersebut sebagai dasar penugasan dalam pelaksanaan *Employee Advocacy* pada Kanwil DJKN Suluttenggomalut.
3. Membuat grup *Employee Advocacy* Kanwil DJKN Suluttenggomalut serta menyampaikan melalui Nota Dinas sebagai sarana menyampaikan topik yang perlu diamplifikasi, mengingatkan pegawai, dan melakukan monev,
4. Membuat tutorial cara melakukan amplifikasi dan melakukan pelaporan yang dapat diakses melalui Satu Kemenkeu pada fitur '*Employee Advocacy*' atau melalui tautan <https://kemenkeu.sharepoint.com/sites/EmployeeAdvocacy> serta internalisasi melalui kegiatan Galang Semangat Pagi,
5. Memberikan pendampingan dan bantuan bagi pegawai yang memiliki hambatan dalam melakukan amplifikasi dan melakukan pelaporan,
6. Melakukan *monitoring* secara berkala sampai dengan batas waktu amplifikasi untuk memastikan agar *baseline* target tercapai.

Akar Masalah dari IKU ini adalah;

1. Dalam satu waktu terdapat beberapa topik yang perlu diamplifikasi oleh pegawai sehingga para pegawai kebingungan topik mana saja yang belum dan yang sudah diamplifikasi.
2. Tidak semua pegawai aktif dan memiliki akun media sosial tertentu (contoh: twiter) dan ada yang kurang berkenan jika melakukan amplifikasi pada media sosial tersebut
3. Cara melakukan amplifikasi dan pelaporan kurang simpel sehingga membuat pegawai kebingungan untuk melakukan amplifikasi.

Sebagai rekomendasi Rencana Aksi di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan strategi komunikasi bulanan kepada KPKNL sebelum tanggal 5
2. Publikasi agenda Selting Kementerian Keuangan
3. Mengimbau seluruh pegawai untuk melakukan amplifikasi konten Kementerian Keuangan (Employee Advocacy)

Usaha dari Kanwil DJKN Suluttenggomalut berhasil membuat IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan dapat tercapai realisasi sebesar **5,59** atau sebesar **120%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **3,55**

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalut	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	MAX/TLK
Realisasi	5,23	5,19	5,19	5,20	5,20	5,59	5,59	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3.19. – Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan

**Perbandingan Capaian IKU
Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan**

Tahun	Target	Realisasi
2022	3.55	4
2023	3.55	5.08
2024	3.55	5.23
2025	3.55	5.59

Peningkatan Capaian atas IKU optimal dan mengalami kenaikan dari sejak tahun 2022, karena semakin banyaknya amplifikasi Agenda Setting Kemenkeu pada media sosial Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut, reminder amplifikasi melalui group serta selalu memberikan pendampingan dan bantuan bagi pegawai yang memiliki hambatan dalam melakukan amplifikasi dan melakukan pelaporan.

IKU 7b-N- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

Penanganan hukum yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya.

IKU ini adalah IKU baru pada tahun 2025 yang bertujuan untuk terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kanwil DJKN Suluttenggomalut	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7b-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	113,71	117,15	117,15	120,78	120,78	120,78	120,78	
Capaian	113,71	117,15	117,15	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3.19 – Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

**Sasaran Strategis 8
Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko
Yang Efektif**

IKU 7a-N – Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Isu utama dalam IKU ini adalah memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Reviu

pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, *monitoring* dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Beberapa hal yang telah dilakukan Kanwil DJKN Suluttenggomlut untuk penyelesaian IKU ini antara lain:

1. Memonitoring capaian kinerja organisasi s.d. Triwulan IV 2025,
2. Melakukan DKO periode s.d Triwulan IV 2025
3. Mengkompilasi Rencana Aksi Mitigasi masing-masing Bidang/Bagian
4. Melengkapi dokumen dan mengisi kertas kerja Pengelolaan Kinerja Organisasi, Pengelolaan Kinerja Pegawai, dan Manajemen Risiko untuk periode Triwulan IV
5. Rapat Pembahasan Usulan Profil Risiko Tahun 2025

Kanwil DJKN Suluttenggomlut berhasil memperoleh realisasi sebesar **96,22** atau sebesar **120,00%** dari besaran target tahun 2025 sebesar 80.

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

T/R	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							Pol/KP
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	MAX/TLK
Realisasi	98,31	93,04	93,04	95,13	95,13	96,22	96,22	
Capaian	120,00	116,30	116,30	118,91	118,91	120,00	120,00	

Tabel 3.20 – Indeks Kualitas Manajemen dan Risiko

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen dan Risiko

Tahun	Target	Realisasi
2023	80	95.14
2024	85	98.18
2025	80	96.22

Capaian IKU ini mengalami penurunan pada tahun 2025 tetapi secara indeks capaian masih 120. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan capaian kinerja dan risiko triwulanan serta adanya komponen pengelolaan kinerja yang tidak dipenuhi sesuai norma waktunya.

IKU 8b-N – Indeks Capaian Unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Isu utama pada pencapaian IKU ini adalah memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut berhasil memperoleh realisasi sebesar **114,72** atau sebesar **120%** dari besaran target tahun 2025 sebesar **100,00**

Adapun *trajectory* IKU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

T/R	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							Pol/KP
	8b-N Indeks Capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM							
	Q1	April-Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	114,72	114,72	
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	114,72	114,72	

Tabel 3.21 Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Perbandingan IKU

Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Tahun	Target	Realisasi
2021	75	97.94
2022	75	99.09
2023	80	95.14
2024	100	120
2025	100	114.72

Capaian IKU ini pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2024 Kanwil DJKN Suluttenggomalut berhasil mempertahankan predikat ZI-WBK sedangkan pada tahun 2025, capaian IKU tersebut belum memperhitungkan hasil pengumuman predikat ZI WBBM dari Kementerian PAN-RB.

CAPAIAN KINERJA KPKNL DI LINGKUP KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT

KPKNL	Persentase Capaian Kinerja		
	2023	2024	2025
Manado	113,34%	111,65%	116,40%
Gorontalo	113,78%	113,65%	114,87%
Palu	111,65%	114,91%	116,14%
Ternate	116,56%	115,47%	115,63%

Tabel 3.22 Capaian Kinerja KPKNL Periode Tahun 2023-2025

Sebagai unit vertikal visi KPKNL adalah sesuai visi DJKN 2020-2025 yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi tersebut masing-masing KPKNL melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Peta Strategi KPKNL dengan mengacu pada Peta Strategis unit di atasnya yaitu Peta Strategi Kemenkeu *Two*, dan pada Tahun 2025 KPKNL memiliki 4 perspektif yang dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis, berikut IKU penopang yang harus dilaksanakan guna mencapai target secara optimal dan tepat waktu.

B. ANALISIS KEBERHASILAN DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengelolaan kekayaan negara merupakan salah satu representasi fungsi Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang secara fungsional dilaksanakan oleh DJKN. DJKN telah menetapkan komitmen besar untuk mewujudkan kekayaan negara yang dikelola secara optimal, berkelanjutan, instrumental dalam keuangan negara dan kontributif dalam perekonomian nasional. DJKN dalam mewujudkan visi dan misinya menuju *Distinguished Asset Manager* melakukan upaya-upaya kreatif, inovatif, serta solutif yang dapat langsung diimplementasikan guna mewujudkan aset yang optimal, dengan salah satunya menyelenggarakan KOIN *Asset Manager* DJKN. Pada tahun ini yang menjadi objek kompetisi adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi *underutilized/idle* dan tidak sedang dimanfaatkan atau diajukan pemanfaatannya yang berada pada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Dalam rangka tercapainya tujuan dari Inisiatif Strategis ini, Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah melakukan beberapa langkah strategis seperti:

1. Menyelenggarakan rapat internal dengan pembahasan mengenai konsep dan strategi pencapaian target tahun 2025,
2. Menyelenggarakan rapat dengan pihak terkait untuk pembahasan pengembangan kerja sama sewa BMN,
3. Memanfaatkan media sosial dan *marketplace*,
4. Melakukan koordinasi intensif dengan masing-masing KPKNL terkait dengan Data Realisasi Penerimaan Negara yang berasal dari Pengelolaan BMN serta Lelang, termasuk meminta masing-masing KPKNL melakukan pemetaan terhadap potensi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran,
5. Melakukan koordinasi dengan para *stakeholders* terkait upaya yang telah dilakukan sampai dengan penggalian potensi pengelolaan BMN serta serta lelang yang masih bisa dioptimalkan, termasuk melakukan *monitoring* terhadap satuan kerja untuk segera menindaklanjuti BMN yang telah diterbitkan surat persetujuan pemindahtanganan serta pemanfaatan,
6. Terus melakukan mitigasi atas setiap potensi risiko yang mungkin terjadi untuk memastikan bahwa realisasi penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan BMN serta Lelang tidak mengalami hambatan.

Dari analisis capaian kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa Kanwil DJKN Suluttenggomalut berhasil meraih capaian target dengan realisasi yang sangat baik di tahun 2025 dan juga terjadi peningkatan kinerja. Hal ini terlihat dari NKO Kanwil DJKNSuluttenggomalut yang mengalami kenaikan dibandingkan NKO tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 Kanwil DJKN Suluttenggomalut mencapai NKO sebesar **116,40%** dengan keseluruhan IKU dengan berstatus Hijau.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025, di antaranya:

1. Kerja sama yang telah dijalin dengan baik oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut dengan KPKNL di lingkungannya serta *stakeholders*, sehingga target kinerja dapat tercapai,
2. Kolaborasi dan sinergi dari semua bagian/bidang di Kanwil DJKN Suluttenggomalut,
3. Adanya kertas kerja monev kinerja yang diciptakan serta dikembangkan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut untuk memantau progres capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,
4. Pengembangan SDM di Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang berjalan baik, yang dilakukan melalui diklat, sosialisasi, dan *knowledge sharing* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja, dan
5. Pemberdayaan sumber daya, baik SDM maupun anggaran di Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang dilakukan secara baik.

Beberapa hambatan yang dihadapi Kanwil DJKN Suluttenggomalut dalam pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain:

1. Rendahnya potensi PNBPN dari pengelolaan BMN karena tingkat pemahaman Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan optimalisasi BMN baik dari segi penggunaan, pemanfaatan, pemindahatanganan dan bentuk pengelolaan lainnya,
2. Proses penerbitan sertipikat memakan waktu yang lama karena keterbatasan petugas ukur di kantor pertanahan serta kendali yang tidak sepenuhnya berada di Kanwil DJKN Suluttenggomalut, dan
3. Perubahan *mindset* bahwa BMN dari *cost centre* menjadi *revenue centre*,
4. Rendahnya angsuran dan/atau pelunasan untuk BKPN lama,
5. Banyak Lelang Tidak Ada Penawaran (TAP), dan
6. Potensi lelang masih belum tergalasi secara optimal,
7. Terdapat perbedaan selisih nilai wajar hasil penilaian dengan indikasi nilai yang diusulkan oleh satuan kerja.
8. Sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan nomor ND- 219/SJ.7/2023 disampaikan bahwa Seluruh Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk menggunakan PDN (Produk Dalam Negeri) dan melakukan Pencatatan PDN dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada aplikasi SAKTI atas setiap transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan memilih produk dengan spesifikasi tertentu, yang disebabkan oleh barang yang akan dibeli di e-Katalog LKPP tidak semuanya memiliki sertifikat TKDN dari Kemenperin. Keadaan tersebut menyebabkan terhambatnya pengadaan barang sesuai *timeline* dan barang yang kerap tidak memenuhi standar spesifikasi tertentu.

Perlu disampaikan pula terkait efisiensi penggunaan sumber daya serta pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko juga terus dilakukan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut sepanjang tahun 2025.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Penggunaan SDM. Kanwil DJKN Suluttenggomalut senantiasa melakukan optimalisasi penggunaan SDM. Penempatan ASN dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, minat dan bakat yang dimiliki pegawai tersebut. Dengan jumlah pegawai sebanyak 41 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari 34

(tiga puluh empat) ASN dan 7 (tujuh) PPNPN, sinergi dan kolaborasi selalu diperhatikan guna tercapainya tujuan bersama. Di samping itu, Kanwil DJKN Suluttenggomalut selalu berupaya melakukan perbaikan kualitas SDM dengan meningkatkan kompetensi dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang bersih, tepat, tepercaya, dan akuntabel sesuai motto Kanwil DJKN Suluttenggomalut yaitu BENTENAN. Tahun 2025 terdapat 1 (satu) pegawai Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang melanjutkan pendidikan program beasiswa S2 di dalam negeri.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran. Kanwil DJKN Suluttenggomalut senantiasa berupaya untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin untuk mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini dapat terlihat dengan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap KPKNL, sehingga dapat menghemat biaya rapat dan perjalanan dinas. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan anggaran TA 2025, Kanwil DJKN Suluttenggomalut melaksanakan instruksi Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 29 Juli 2019. Efisiensi tersebut dilaksanakan dengan beberapa cara di antaranya:
 - a. Pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas melalui pemanfaatan teknologi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tugas dan fungsi yang dapat dilakukan secara daring untuk mengurangi frekuensi kegiatan perjalanan dinas,
 - b. Pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Standar Biaya Masukan (SBM),
 - c. Pembayaran honorarium jasa profesi hanya diperkenankan bila narasumber berasal dari Kementerian/Lembaga lain dan/atau pihak lain, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelaksanaan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, FGD, serta kegiatan sejenis.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Energi, Listrik, Air, dan Alat Tulis Kantor (ATK). Menteri Keuangan telah menginstruksikan gerakan efisiensi sebagai bagian dari implementasi penguatan budaya di Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah dengan pelaksanaan penghematan energi yang meliputi penghematan penggunaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan air. Selain itu, Kementerian Keuangan telah menggunakan aplikasi *Office* Kemenkeu sejak tahun 2019 dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan secara administrasi. Penggunaan *Office* Kemenkeu telah mendukung upaya efisiensi menciptakan kantor ramah lingkungan. Kanwil DJKN Suluttenggomalut senantiasa mendorong perilaku keseharian pegawai untuk efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

D. ANALISIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI/ MITIGASI RISIKO

Berdasarkan identifikasi, analisis, dan evaluasi mitigasi risiko di akhir tahun 2025 telah dilaksanakan rapat terkait Profil dan Peta Risiko Tahun 2025 dan telah dipetakan menjadi 29 (dua puluh sembilan) kejadian risiko pada Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Telah diprioritaskan 4 (empat) risiko berdasarkan besaran risiko yang wajib di mitigasi, serta memerlukan penanganan/mitigasi risiko untuk menurunkan besaran risikonya. Dari empat kejadian risiko tersebut terdapat satu

berstatus oranye (tinggi). Berikut hasil pemantauan risiko pada Kanwil DJKN Suluttenggomalat pada tahun 2025:

Prioritas	No.RE	Riski Event	Status	Risiko Awal	Q4
SO_5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
1	#5.3	Banyaknya lelang TAP	Orange	25	17
SO_6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
2	#6.5	Penarikan dana tidak sesuai dengan rencana	Hijau	19	6
SO_1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
3	#1.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.	Hijau	15	10
SO_3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa					
4	#3.4	Tingkat kepuasan pengguna layanan yang terus meningkat (<i>upside risk</i>)	Hijau	8	10
SO_2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
5	#2.3	Pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> terkendala jaringan internet	Hijau	8	8
SO_2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
6	#2.5	Rendahnya Kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima dari K/L.	Hijau	11	6
SO_6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
7	#6.4	Adanya penghematan Anggaran	Hijau	1	6
SO_8 Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif					
8	#8.2	Rendahnya pemahaman pengelolaan kinerja dan analisis risiko oleh pegawai	Hijau	6	6
SO_1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					
9	#1.2	Adanya BMN yang telah dilakukan perjanjian pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan pemanfaatan pengelola barang	Biru	5	5
SO_2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
10	#2.2	Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN	Biru	5	5
11	#2.4	Adanya pembatalan lelang	Biru	10	5
SO_7 Penanganan Hukum dan Komunikasi publik yang efektif					
12	#7.2	Penyalahgunaan informasi publik yang dikecualikan	Biru	5	5
SO_6 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					
13	#6.1	<i>Ownership</i> pegawai terhadap organisasi (termasuk pelanggaran non-fraud, seperti judi online)	Hijau	12	5
14	#6.2	Adanya pelanggaran kode etik dan disiplin oleh pegawai	Biru	5	5
SO_5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
15	#5.1	Pengurusan BKPN banyak berfokus pada register penyerahan BKPN baru	Biru	4	4
SO_2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					
16	#2.1	Pengadaan BMN tanah bangunan yang melebihi ketentuan	Biru	2	2
SO_3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa					
17	#3.1	Penyelesaian permohonan melewati SOP	Biru	1	1
SO_5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					
18	#5.2	Nilai wajar hasil penilaian BMN belum akurat berdasarkan hasil kaji ulang	Biru	1	1
19	#5.4	Objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang	Biru	1	1

Prioritas	No.RE	Riski Event	Status	Resiko Awal	Q4
SO_3		Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			
20	#3.2	Adanya pengenaan biaya diluar ketentuan oleh oknum pegawai	Biru	1	1
21	#3.3	Adanya pengaduan dari pengguna layanan	Biru	1	1
SO_4		Penerapan tata kelola aset yang efektif			
22	#4.1	BMN berupa tanah tidak dilengkapi dokumen perolehan	Biru	1	1
23	#4.2	Adanya aset yang digunakan oleh pihak lain dan tidak sesuai ketentuan	Biru	1	1
SO_6		Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
24	#6.3	Tidak sesuai nya kompetensi pegawai dengan bidang tugas	Biru	1	1
25	#6.6	Adanya komponen belanja modal yang tidak terdapat dalam unsur perhitungan TKDN	Biru	1	1
26	#6.7	Informasi transaksi PNPB yang tersaji dari sistem informasi tidak akurat	Biru	1	1
SO_7		Penanganan Hukum dan Komunikasi publik yang efektif			
27	#7.1	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial	Biru	1	1
SO_8		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
28	#8.1	Temuan berulang oleh APIP/BPK	Biru	1	1
29	#8.3	Temuan ketidakpatuhan pada LHPPU atas dokumen layanan oleh KPKNL	Biru	1	1

Tabel 3.23. Hasil Pemantauan Risiko Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun 2025

Kanwil DJKN Suluttenggomalut selalu berusaha untuk mencari solusi dan upaya perbaikan ke depannya. Adapun rencana aksi Kanwil DJKN Suluttenggomalut Terkait manajemen risiko di Kanwil DJKN Suluttenggomalut antara lain:

Kanwil DJKN Suluttenggomalut telah melakukan beberapa kegiatan penanganan Risiko *Event* Banyaknya Lelang TAP dan Risiko *Event* Adanya Pembatalan Lelang seperti optimalisasi pemasaran lelang, sosialisasi/koordinasi/kolaborasi, serta penggalan potensi lelang, edukasi dan memasyarakatkan lelang. Bekerja sama dengan KPKNL maupun *stakeholders* lainnya. Sementara terkait Risiko *Event* Adanya BMN yang telah dilakukan perjanjian Pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan, telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pelaksanaan FGD Lingkup PKN serta *monitoring* Laporan Pengawasan dan Pengendalian.

E. RENCANA AKSI KE DEPAN

Kanwil DJKN Suluttenggomalut selalu berusaha untuk mencari solusi dan upaya perbaikan ke depannya. Adapun rencana aksi Kanwil DJKN Suluttenggomalut terkait manajemen risiko pada Kanwil DJKN Suluttenggomalut, berdasarkan pemantauan sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, risiko utama dapat diturunkan besaran risikonya menjadi *level* risiko rendah untuk tahun 2025 adalah:

1. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara
 - a. Melakukan verifikasi perhitungan kesesuaian data awal SBSK dari KPKNL,
 - b. Melakukan koordinasi dengan KPKNL terkait realisasi dan data PNPB BMN,
 - c. Melakukan koordinasi terkait sertifikasi dengan KPKNL dan BPN,
 - d. Menyampaikan hasil reuiu LEK pada KPKNL, dan
 - e. Melakukan monitoring tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset pada KPKNL,
2. Terkait Pengurusan Piutang Negara
 - a. Pembinaan dan pendampingan sekaligus melakukan pembedahan BKPN dengan KPKNL,
 - b. Melakukan FGD *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja PN,
 - c. Melakukan *cleansing* anomali data BKPN pada *FocusPN*,
 - d. Melakukan koordinasi dan penggalan potensi penyerahan, dan
 - e. Mengoptimalkan potensi BKPN Piutang Daerah.

3. Terkait Lelang
 - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Balai Lelang dan PL Kelas II,
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap PL Kelas I dan PL Kelas II,
 - c. Penggalan potensi lelang baik di dalam maupun di luar kota Manado,
 - d. Penggalan potensi lelang BMN/BMD pada satuan kerja,
 - e. Mengoptimalkan pemasaran melalui *Whatsapp*, Katalog Lelang, *portal*
 - f. Lelang secara rutin,
 - g. Mengadakan Pekan Lelang Properti,
 - h. Menyelenggarakan FGD Evaluasi Kinerja Lelang dan Strategi Lelang Tahun 2025, dan,
 - i. Melakukan sosialisasi peraturan lelang kepada *stakeholders*.
4. Terkait Penilaian
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan/atau FGD dengan Penilai Pemerintah pada lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalu,
 - b. Melakukan verifikasi atas hasil survei tanah dari KPKNL,
 - c. Melakukan kegiatan penilaian BMN apabila ada permohonan dengan asal pemohon dari Bidang PKN dan/atau selain dari Bidang PKN,
 - d. Melakukan kegiatan penilaian BMD apabila ada permohonan dengan asal pemohon dari Pemerintah Provinsi di wilayah Suluttenggomalu,
 - e. Melakukan kegiatan *peer* review laporan penilaian,
 - f. Melakukan kegiatan survei basis data,
 - g. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data DKPB 2025 yang telah diserahkan oleh KPKNL,
 - h. Melakukan kaji ulang laporan penilaian yang disampaikan oleh KPKNL, dan
 - i. Membuat laporan analisis hasil kaji ulang laporan penilaian KPKNL dalam periode triwulanan.
5. Terkait Pengembangan SDM dan Kinerja Pegawai
 - a. Mengadakan kegiatan belajar melalui *sharing session*,
 - b. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai secara maksimal,
 - c. Melakukan internalisasi peraturan kepegawaian serta pengelolaan kinerja kepada semua pegawai,
 - d. Konsisten melaksanakan perbaikan layanan dengan menerapkan inovasi yang telah dibuat dan senantiasa menjaga budaya integritas.

F. REALISASI ANGGARAN

1. DIPA Tahun 2025. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran belanja Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara mencapai **Rp2.270.189.000,00** atau sebesar **98,99%** dari DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.247.235.118,00. Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara senantiasa mengelola anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 tersaji dalam tabel berikut ini:

JENIS BELANJA	Pagu Awal	Realisasi s.d. Des 2025		Efisiensi	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Belanja Barang	2.218.189.000	2.197.729.468	99,08	20.459.532	0,92
Belanja Modal	52.000.000	49.505.650	95,20	2.494.350	4,80
JUMLAH	2.270.189.000	2.247.235.118	98,99	22.953.882	1,01

Tabel 3.24. Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN Suluttenggomalu Tahun 2025

2. Belanja Barang. Secara rinci Belanja Barang Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun Anggaran 2025 terlihat melalui tabel sebagai berikut:

No	Uraian RO	Pagu Tahun Anggaran 2025	Realisasi	% Realisasi
1	Kerumahtangaan	145.421.000	144.899.773	99,64%
2	Layanan Perkantoran	1.143.712.000	1.141.887.894	99,84%
3	Aset BUN yang dikelola	501.218.000	499.073.000	99,57%
4	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	133.271.000	128.621.413	96,51%
5	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	18.000.000	15.140.776	84,12%
6	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	38.000.000	38.000.001	100,00%
7	Penggalian Potensi Lelang	4.229.000	3.408.000	80,59%
8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	9.008.000	8.922.300	99,05%
9	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	2.250.000	1.799.000	79,96%
10	Rekomendasi Kepatuhan Internal	18.450.000	17.834.161	96,66%
11	Kehumasan	19.500.000	17.099.040	87,69%
12	Layanan Bantuan Hukum	14.500.000	14.140.000	97,52%
13	Rekomendasi Hasil Penilaian	54.884.000	52.386.511	95,45%
14	Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	54.510.000	54.361.600	99,73%
15	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	61.236.000	60.156.000	98,24%
Total		2.218.189.000	2.197.729.469	99,08%

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran dan Capaian Output Kanwil DJKN Suluttenggomalut TA 2025

3. Belanja Modal. Untuk Tahun 2025 Kanwil DJKN Suluttenggomalut terdapat alokasi DIPA untuk Belanja Modal. Secara rinci Belanja Modal Kanwil DJKN Suluttenggomalut Tahun Anggaran 2025 terlihat melalui tabel sebagai berikut:

No	Uraian RO	Pagu Tahun Anggaran 2025	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.000.000	49.505.650	95,20%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0%
Total		52.000.000	49.505.650	95,20%

Tabel 3.26. Belanja Modal dan Capaian Output Kanwil DJKN Suluttenggomalut TA 2025

G. PRESTASI KANWIL DJKN SULUTTENGOMALUT

Sepanjang tahun 2025, Kanwil DJKN Suluttenggomalut selalu berupaya memberikan kinerja terbaiknya dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Atas hasil kerja keras dan semangat para pegawainya, Kanwil DJKN Suluttenggomalut berhasil menorehkan beberapa prestasi, di antaranya:

1. Capaian Duta Transformasi Terbaik I di lingkungan DJKN dan Terbaik III Kementerian Keuangan;
2. Peringkat 4 Finalis Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) tahun 2025 yang

diselenggarakan oleh DJKN;

3. Konten Instagram terbaik di lingkungan DJKN Semester I Tahun 2025;
4. Peringkat I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara di wilayah Sulawesi Utara;
5. Penghargaan atas Sinergi Berkelanjutan dalam Penegakan Hukum Barang Illegal di Bidang Kepabeanan dan Cukai dari Kanwil DJBC Sulbagtara;

Semua data, piagam dan penghargaan atas prestasi tersebut diatas terdapat pada halaman lampiran dalam Laporan Kinerja (Lkj) tahun 2025 ini.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada IKU. Pada awal tahun 2025, telah ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) IKU. Penetapan Sasaran Strategis dan IKU tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut tahun 2025 yang juga merupakan turunan dari IKU DJKN.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kanwil DJKN Suluttenggomalut dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang menghadapi tantangan di tahun 2025. Kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif pasca wabah Pandemi Covid-19, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Namun demikian, Kanwil DJKN Suluttenggomalut senantiasa berusaha menjadikan setiap kendala atau tantangan sebagai peluang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil capaian kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut tahun 2025 yang terdiri dari 20 (dua puluh) IKU, secara keseluruhan berstatus hijau. Kanwil DJKN Suluttenggomalut juga berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tertinggi sepanjang lima tahun terakhir yaitu sebesar 116,40%, mengalami peningkatan dibandingkan NKO di tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang telah berkontribusi untuk negara Indonesia tercinta.

B. LANGKAH KANWIL DJKN SULUTTENGGOMALUT KE DEPAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Suluttenggomalut menghadapi perubahan lingkungan organisasi seiring dengan perkembangan teknologi yang berpengaruh ke proses bisnis dan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang lebih baik.

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut secara detil terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang, penilaian, dan kegiatan lainnya yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan dengan didukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkala,

2. Perbaiki pelayanan demi mendukung pelayanan yang bersih, energik, tepercaya, dan akuntabel, sebagaimana moto pelayanan Kanwil DJKN Suluttenggomalut yakni BENTENAN,
3. Perbaiki proses bisnis dengan inovasi-inovasi yang berkelanjutan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi para *stakeholders*,
4. Implementasi strategi pengarusutamaan *gender* (PUG) dalam pelaksanaan tugas,
5. Mewujudkan capaian Zona Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna mewujudkan kantor ramah lingkungan(*eco office*),

Segala capaian Kanwil DJKN Suluttenggomalut yang berhasil diraih di tahun 2025, merupakan hasil kerja sama antara Kanwil DJKN Suluttenggomalut dengan KPKNL yang berada di lingkungannya serta sinergi yang telah terjalin dengan baik antara bagian/bidang di Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Hal baik ini harus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, karena suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten, maka dibutuhkan kerja sama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan Kanwil DJKN Suluttenggomalut.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait atas capaian kinerja dan strategis Kanwil DJKN Suluttenggomalut, sehingga dapat berguna dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal, Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan secara eksternal, Laporan Kinerja ini harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kanwil DJKN Suluttenggomalut dapat meningkatkan kinerjanya dan semakin dirasakan perannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Akhir kata, Kanwil DJKN Suluttenggomalut mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kinerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut, dan dengan kerendahan hati kami menerima saran maupun masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depannya menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.



Lampiran

Ceklist Kelengkapan

Lampiran I

No.	Kelengkapan	Cheklist
1	Data Diyakini Keandalannya (sesuai dengan Laporan Capaian Kinerja 2025)	√
2	Tujuan/sasaran/Indikator sesuai Renstra/Renja	√
3	Terdapat perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini	√
4	Terdapat perbandingan target/realisasi kinerja dengan: <ul style="list-style-type: none"> • capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, • target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi • target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 • Standar Nasional (jika ada) 	√ √ √ Tidak ada dan sudah dinarasikan
5	Kaitan pencapaian target tahun 2025 dengan target/sasaran dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029 dan atau Renja 2025	√
6	Menjelaskan upaya-upaya <i>extra effort</i> yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja	√
7	Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah Dilakukan	√
8	Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	√
9	Menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√
10	Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi 2024 yang telah di- <i>uploaded</i> ke aplikasi esakip)	√
11	Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala	√
12	Mencantumkan rencana aksi ke depan	√

Kanwil DJKN Suluttenggomaut Tahun Anggaran 2025

Formulir Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	100%	105,32	105,32
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,48%	120,00
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	116,78%	116,78
		Persentase realisasi pokok lelang	100%	102,15%	102,15
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	216,30%	120,00
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	99,01	120,00
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	108,34	120,00
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70,00	87,78	120,00
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang diserifikatkan	100,00%	139,52%	120,00
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100,00%	118,75%	118,75
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produkti	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	123,36%	120,00
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	109,08%	120,00
		Persentase produktivitas lelang	80,00%	118,67%	120,00
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	125,22	120,00
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	100,00%	120,00
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	5,59	120,00
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	120,78	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	96,22	120,00
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	114,72	114,72



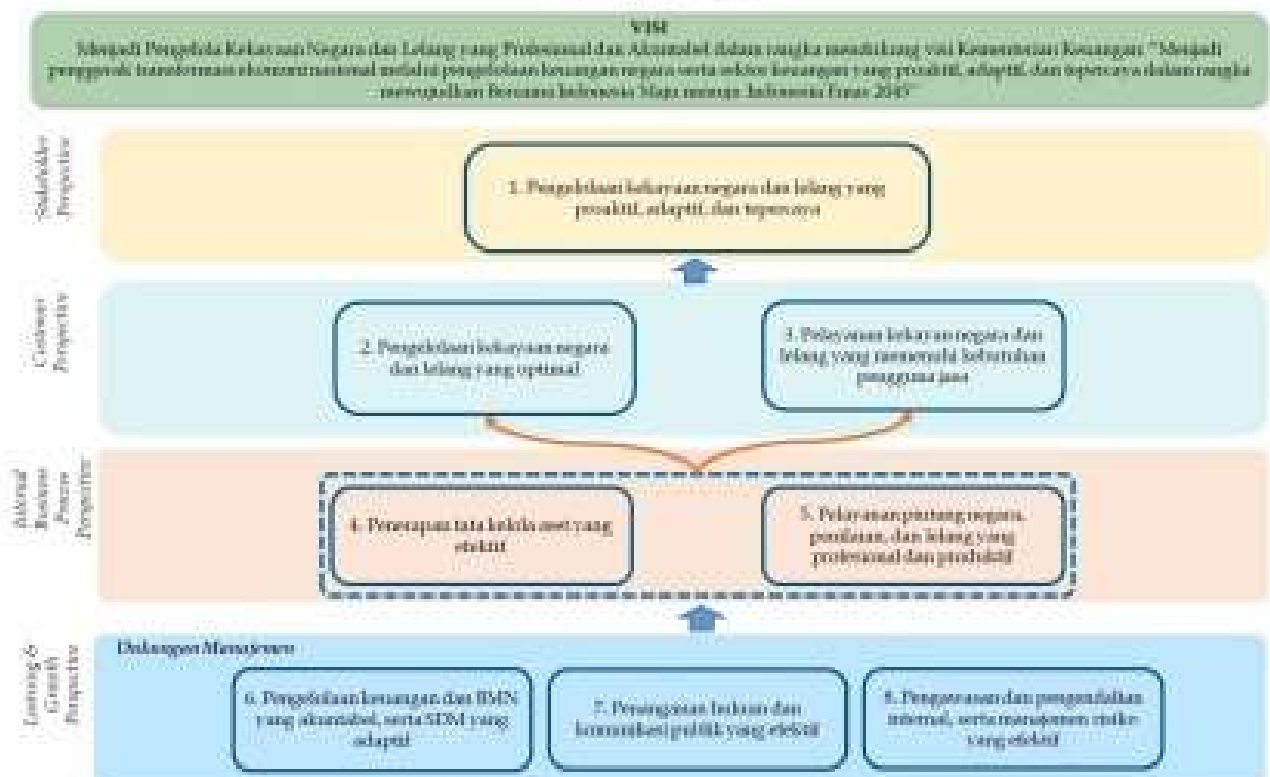
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-25/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesanggupan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menrima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp83,1 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,0 T)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp4,6 M)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBEM	100

Program/Kegiatan Tahun 2025		Anggaran
Program :		
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp 1.163.540.000
Kegiatan		
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	80.300.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	349.143.000
3. Pengelolaan Aset	Rp	729.597.000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	4.500.000
Program :		
Dukungan Manajemen		Rp 5.273.224.000
Kegiatan		
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	14.500.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.173.224.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	48.600.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	36.900.000

Kota Manado, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-N	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp83,1 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,0 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,5 M)
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	70	70	70	70	70	70
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	barang dan jasa							
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Manado, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH,
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1								

Kota Manado, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
 Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan
 Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
 R. Ay. Indriasari Sundoro

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Indriasari Sundoro	NAMA	Rionald Silaban
NIP	197502191995032001	NIP	196604231990101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp83,1 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,0 T)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,7 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	<u>Proses Bisnis</u>
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	<u>Proses Bisnis</u>
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	<u>Proses Bisnis</u>
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	<u>Proses Bisnis</u>

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
		Persentase produktivitas lelang	80%	<u>Proses Bisnis</u>
6	Pengelolaan keuangan dan EMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	+
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Kota Manado, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	43 (empat puluh tiga) pegawai pada Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp83,1 M)
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,0 T)
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp3,7 M)
6	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
7	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
8	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	70	70	70	70	70	70
9	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
10	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
11	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
13	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
14	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
15	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
17	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
18	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
19	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
20	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Manado, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ronald Silaban
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

R. Ay. Indriasari Sundoro
19750219 199503 2 001

ADENDEUM PERJANJIAN KINERJA 2025



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-25a/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU
UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp83,1 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp4,6 M)
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,0 T)
		2c-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3c-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang efektif	4a-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%

5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp1,163,540,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp80,300,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp349,143,000
3. Pengelolaan Aset Rp729,597,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Rp4,500,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp5,273,224,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp14,500,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp5,173,224,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp48,600,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp36,900,000

Manado, 20 November 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
R. Ay. Indriasari Sundoro

PENGHARGAAN

Capaian Duta Transformasi Terbaik I di lingkungan DJKN dan Terbaik III Kementerian Keuangan;

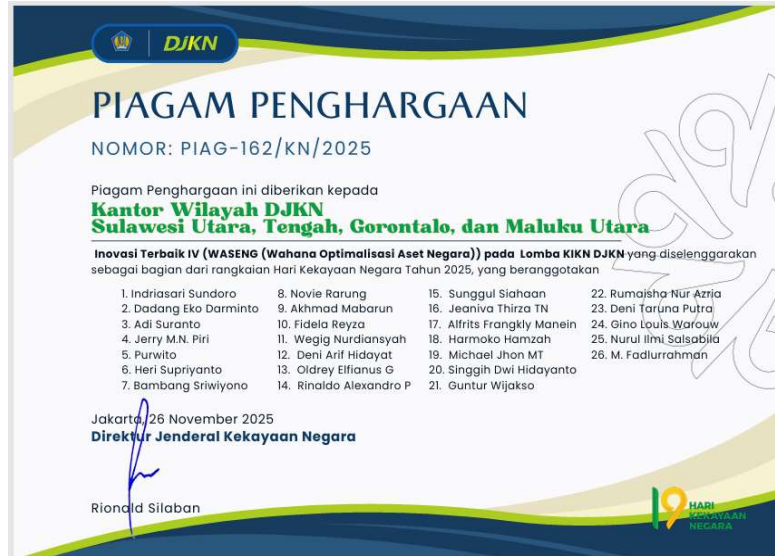
Unit Eselon I	Unit Eselon II	Average of Nilai Akhir
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Pusdiklat Pajak	120.00%
	Sekretariat BPPK	119.65%
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	117.13%
	Sekretariat BaTii	109.64%
	Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi	109.16%
	Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi	107.44%
Direktorat Jenderal Anggaran	Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	118.51%
	Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	117.93%
	Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran	114.00%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	120.00%
	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	120.00%
	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	119.68%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	120.00%
	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	119.51%
	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	118.98%

Unit Eselon II	Average of Nilai Akhir
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	120.00%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau	120.00%
Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	120.00%
Biro Perencanaan dan Keuangan	120.00%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara	120.00%
Direktorat Penegakan Hukum	120.00%
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	120.00%
Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	120.00%
Pusdiklat Pajak	120.00%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung	120.00%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara	120.00%
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	119.84%
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	119.74%
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	119.68%
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan	119.65%
Sekretariat BPPK	119.65%

> ≡ Peringkat Kemenkeu Peringkat UE II tiap UE I Per UE I Dashboard UE I +

PENGHARGAAN

Peringkat 4 Finalis Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) tahun 2025



DOKUMENTASI FINALIS KOMPETISI INOVASI KEKAYAAN NEGARA



PENGHARGAAN

Konten Instagram terbaik di lingkungan DJKN Semester I Tahun 2025



PENGHARGAAN

Peringkat I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara di wilayah Sulawesi Utara



PENGHARGAAN

**Sinergi Berkelanjutan dalam Penegakan Hukum Barang Illegal
di Bidang Kepabeanan dan Cukai dari Kanwil DJBC Sulbagtara**





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA